



DINAMIKA ISLAM INDONESIA: PERGESERAN PARADIGMA DARI ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI

DYNAMICS OF INDONESIAN ISLAM: PARADIGM SHIFT FROM THE OLD ORDER TO THE REFORM ERA

Siti Munawaroh¹, Shelsie Amalia Putri², Zahroni³, Ahmad Maftuh Sujana⁴

Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

Email: intec.siti@gmail.com¹, shelsieamaliaaa@gmail.com², mhmdzahroni255@gmail.com³

maftuhsujana@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 15-05-2025

Revised : 17-05-2025

Accepted : 19-05-2025

Published : 22-05-2025

Abstract

The dynamics of Islam in Indonesia have undergone significant changes from the Old Order to the Reformation Era, reflecting a complex journey in the socio-political context. During the Old Order (1945-1966), Muslims were actively involved in ideological debates on the foundation of the state, although they faced significant political marginalization. Islamic parties were restricted, and many important figures were arrested, resulting in limited space for Islamic voices in politics. Furthermore, during the New Order (1966-1998) under Soeharto's leadership, the government implemented a strategy of depoliticizing Islam to maintain political stability, resulting in tight controls on religious expression. Moderate organizations such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama were often ignored, and policies such as the ban on the hijab in public schools in the 1980s sparked the formation of advocacy groups such as Wahdah Islamiyah. However, after the 1998 Reformation, Muslims gained the freedom to express their beliefs and participate in politics. The emergence of Islamic political parties and organizations fighting for the implementation of Islamic law reflects a paradigm shift towards active involvement in public policy. However, this era also witnessed the rise of radical groups who took advantage of the new freedoms to promote extreme agendas, challenging national identity and social cohesion. Therefore, it is important to prioritize multicultural education to build unity and reduce conflict in Indonesia's diverse society, as well as balance between conservatism and moderation in Islamic thought.

Keywords: *Islam, Old Order, New Order, Reformation, Religious Practices.*

Abstrak

Dinamika Islam di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari Orde Lama hingga Era Reformasi, mencerminkan perjalanan kompleks dalam konteks sosial-politik. Pada masa Orde Lama (1945-1966), umat Islam terlibat aktif dalam perdebatan ideologis mengenai dasar negara, meskipun mereka menghadapi marginalisasi politik yang signifikan. Partai-partai Islam dibatasi, dan banyak tokoh penting ditangkap, yang mengakibatkan terbatasnya ruang bagi suara Islam dalam politik. Selanjutnya, pada era Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah menerapkan strategi depolitikasi Islam untuk menjaga stabilitas politik, yang mengakibatkan kontrol ketat terhadap ekspresi keagamaan. Organisasi moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sering diabaikan, dan kebijakan seperti pelarangan hijab di sekolah-sekolah umum pada tahun 1980-an memicu pembentukan kelompok advokasi seperti Wahdah Islamiyah. Namun, setelah Reformasi 1998, umat Islam mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka dan berpartisipasi dalam politik. Munculnya partai-partai politik Islam dan organisasi yang memperjuangkan penerapan syariat Islam mencerminkan perubahan paradigma menuju keterlibatan aktif dalam kebijakan publik. Meskipun demikian, era ini juga menyaksikan kebangkitan kelompok radikal



yang memanfaatkan kebebasan baru untuk mempromosikan agenda ekstrem, yang menantang identitas nasional dan kohesi sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan pendidikan multikultural guna membangun persatuan dan mengurangi konflik dalam masyarakat Indonesia yang beragam, serta menyeimbangkan antara konservatisme dan moderasi dalam pemikiran Islam.

Kata Kunci : Islam, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Praktik Keagamaan

PENDAHULUAN

Dinamika Islam di Indonesia merupakan cerminan kompleksitas interaksi antara agama, politik, dan budaya yang terjadi dalam konteks perubahan sosial dari Orde Lama hingga era Reformasi. Periode ini sangat signifikan karena mencerminkan pergeseran paradigma pemikiran dan praktik keagamaan yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan umat Islam, tetapi juga hubungan antara negara dan Islam itu sendiri. Selama era Orde Lama, gerakan politik Islam mengalami marjinalisasi dan pembatasan ruang gerak dalam berpolitik. Pemerintah mewaspadai partai-partai Islam, dan sering kali memasukkan partai-partai Islam ke dalam daftar hitam dan membatasi aktivitas mereka (Hajar Dkk, 2024). Berbagai kebijakan pemerintah yang otoriter mengekang partisipasi politik umat Islam, sehingga mereka merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sosial dan keagamaan mereka.

Masuknya Orde Baru di bawah rezim Soeharto, dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena keterlibatan mereka dalam pembentukannya, sehingga mereka berharap bisa berkiprah dalam politik (Rahman, 2017). Namun nyatanya umat Islam mengalami marginalisasi lebih lanjut. Partai-partai Islam dibatasi ruang geraknya, dan banyak tokoh Islam yang ditangkap atau dibungkam karena dianggap subversif. Namun, dengan runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, muncul peluang baru bagi umat Islam untuk mengekspresikan pemikiran dan praktik keagamaan mereka secara lebih bebas. Era Reformasi ditandai dengan kebangkitan semangat untuk menerapkan syariat Islam dan mengadvokasi peran lebih besar dalam politik nasional.

Dengan berakhirnya Orde Baru dan memasuki era Reformasi pada tahun 1998, terjadi transformasi yang signifikan dalam pemikiran dan praktik keagamaan di Indonesia. Reformasi membuka peluang baru bagi umat Islam untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik, memunculkan berbagai organisasi dan partai Islam yang sebelumnya tertekan. Isu-isu seperti penerapan syariat Islam mulai mendapatkan perhatian lebih besar, mencerminkan perubahan paradigma yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Permasalahan yang akan dibahas dalam kepenulisan ini adalah bagaimana paradigma Islam di Indonesia bergeser dan berkembang dari Orde Lama hingga era Reformasi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pergeseran paradigma pemikiran serta praktik keagamaan Islam selama periode tersebut. Fokus pembahasan akan dibatasi pada pemikiran dan praktik keagamaan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks sosial-politik dari Orde Lama hingga Reformasi.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam mengenai Dinamika Islam dan Praktik Keagamaan di Indonesia, pada masa Orde Lama hingga Reformasi. Jenis dan sumber data menggunakan studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, makalah dan berbagai literatur ilmiah. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis dari hasil studi literatur hingga penarikan kesimpulan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam Pada Masa Orde Lama

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, muncul ideologi nasionalisme kuat yang tidak hanya menghimpun berbagai kelompok etnis dan agama, tetapi juga mempengaruhi pemikiran keagamaan, khususnya Islam. Eksistensi Islam sebagai salah satu komponen utama dalam pembentukan negara terlihat jelas ketika perdebatan tentang dasar negara muncul. Banyak tokoh Muslim yang terlibat dalam diskusi tentang pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam konstitusi, terutama dalam konteks 1945 dan prinsip-prinsipnya (Sodikin Dkk, 2024). Pemikiran Islam pada masa ini berperan sentral dalam memberikan legitimasi kepada negara yang baru berdiri, dan perdebatan mengenai penerapan syariah menjadi salah satu fokus utama (Indrayani Dkk, 2023).

Pemikiran Islam pada masa ini didominasi oleh dua aliran besar: modernisme dan tradisionalisme. Kelompok seperti Muhammadiyah, yang mewakili modernisme, mendorong reformasi pemikiran Islam dengan menekankan rasionalitas dan pembaruan, sementara Nahdlatul Ulama (NU) setia pada tradisi dan praktik keagamaan yang telah ada (Laila, 2022). Munculnya berbagai aliran ini menciptakan keragaman pemikiran dalam tubuh umat Islam di Indonesia, yang berkontribusi dalam membentuk identitas nasional. Hubungan antara agama dan negara pun terjalin erat, dengan Islam tidak hanya dianggap sebagai agama pribadi tetapi juga sebagai landasan moral bagi pemerintah.

Salah satu karakteristik utama pemikiran keagamaan pada periode ini adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. Semangat nasionalisme dan kebutuhan untuk membentuk karakter bangsa berlandaskan nilai-nilai agama mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, meskipun menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan perbedaan antara pendidikan agama tradisional dan pendidikan umum. Dualisme pendidikan pun muncul, di mana pelajaran agama digabungkan dengan pelajaran umum. Hal ini diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Desember 1946 yang mewajibkan pelajaran agama Islam di sekolah umum, sementara pendidikan umum diberikan di sekolah atau lembaga pendidikan Islam (Nirmala, 2024).

Pengaruh pemikiran tokoh-tokoh kunci seperti KH. Ahmad Dahlan dan K.H Hasyim Asy'ari, terlihat dalam usaha mereka untuk menginterpretasikan dan menetapkan ajaran Islam dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Misalkan K.H Ahmad Dahlan yang berupaya memodernisasi pendidikan Islam agar mampu melahirkan generasi intelektual yang tidak hanya memiliki keimanan yang kuat tetapi juga wawasan luas (Darwis et al., 2024). Ia mendirikan Muhammadiyah, sebuah organisasi yang berperan besar dalam membangun ribuan lembaga pendidikan dengan sistem modern. Sementara itu, K.H Hasyim Asy'ari lebih menekankan pentingnya pemahaman Islam dalam konteks budaya lokal, sehingga pendekatannya lebih tradisional. Dengan mendirikan Nahdlatul Ulama, ia turut berkontribusi dalam membangun berbagai lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia (Darwis et al., 2024).

Hubungan antara kelompok Islam modernis dan tradisional sering kali diwarnai oleh ketegangan, namun juga menghasilkan dialog yang membangun. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebagai partai politik Islam yang dominan, melakukan oposisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dianggap otoriter dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam,



menegaskan bahwa pluralisme dalam praktik keagamaan adalah hal yang vital bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.

Pada masa Orde Lama (1945-1966), hubungan antara negara dan kelompok-kelompok Islam mengalami dinamika yang kompleks, terutama di bawah sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkan oleh Presiden Soekarno. Sistem ini secara signifikan memarginalisasi partai-partai Islam, meskipun terdapat upaya kolaborasi di beberapa sektor. Partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tekanan besar. Masyumi, yang menolak gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), akhirnya dibubarkan pada tahun 1960 (Romli, 2004). Sebaliknya, NU memilih untuk beradaptasi dengan mendukung Demokrasi Terpimpin, sehingga tetap memiliki akses ke jaringan kekuasaan meskipun dalam posisi marginal.

Selain itu, munculnya gerakan Darul Islam, yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, muncul sebagai respons terhadap marginalisasi politik Islam di Indonesia. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat, yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara teokratis Islam (Ridlo, 2019). Gerakan ini berakar dari ketidakpuasan terhadap Perjanjian Renville, yang memaksa pasukan TNI untuk meninggalkan Jawa Barat (Miftahudin Dll, 2020). Kartosuwiryo memanfaatkan jaringan pesantren dan milisi Hizbullah-Sabilillah untuk membangun Tentara Islam Indonesia (TII). Strategi politiknya, yang dikenal sebagai "Politik Hijrah", dipengaruhi oleh HOS Cokroaminoto dan bertujuan untuk melanjutkan perjuangan Islam di Indonesia melalui cara-cara non-kooperatif (Suryana, 2019). Meskipun pada awalnya berhasil, gerakan ini akhirnya ditekan oleh pemerintah melalui operasi militer yang intensif, yang berujung pada eksekusi Kartosuwiryo pada tahun 1965.

Pemikiran Kartosuwiryo mencerminkan pandangan bahwa hukum Allah hanya dapat diterapkan secara sempurna dalam sebuah negara Islam. Ia menolak ideologi Pancasila dan demokrasi sekuler karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Gagasan ini menjadi salah satu bentuk perlawanan ideologis terhadap upaya pemerintah Orde Lama untuk menempatkan agama dalam kerangka nasionalisme sekuler. Sementara itu, kelompok Islam lain seperti Muhammadiyah dan NU memilih jalur yang lebih moderat dengan tetap berpartisipasi dalam struktur negara, meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah.

Masa Orde Lama menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok Islam berupaya memperjuangkan aspirasi mereka di tengah tekanan politik yang semakin besar dari pemerintah pusat. Meskipun mengalami marginalisasi, pemikiran Islam tetap berkembang dengan berbagai pendekatan, baik melalui jalur politik maupun pendidikan dan dakwah. Dengan demikian, periode ini menandai fase penting dalam perjalanan Islam di Indonesia, di mana perdebatan antara Islam dan negara menjadi isu utama yang terus berkembang hingga masa-masa berikutnya.

Islam Pada Masa Orde Baru

Pada era Pemerintahan Orde Baru, aspek politik dan sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh fokus utama pemerintah dalam mencapai stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi yang besar. Pemerintahan Soeharto mengadopsi ideologi pembangunanisme sebagai dasar untuk mengatur berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan. Di tengah dinamika politik yang berkaitan erat dengan kekuatan militer, pemerintah secara strategis memanfaatkan sistem pendidikan sebagai alat ideologis untuk menanamkan loyalitas terhadap rezim melalui



program-program pendidikan wajib dan pembentukan kelompok belajar yang menekankan nilai-nilai ketaatan dan disiplin (Loppies, 2023). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat struktur kekuasaan Orde Baru, tetapi juga menciptakan suasana politik yang teratur dan homogen, di mana mekanisme kontrol negara terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekspresi keagamaan, dilaksanakan secara sistematis.

Sejalan dengan strategi ideologi tersebut, kebijakan pemerintah terhadap Islam pada masa Orde Baru ditandai dengan penerapan konsep depolitisasi yang bertujuan membatasi ruang gerak politik organisasi-organisasi Islam. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah dalam mengendalikan bentuk-bentuk ekspresi keagamaan agar tidak memicu mobilisasi massa yang dianggap dapat mengancam stabilitas politik. Kendati begitu, Orde Baru tetap menyediakan ruang terbatas bagi pembaruan pemikiran keagamaan. Ruang ini dimanfaatkan oleh para intelektual Islam untuk mengadopsi nilai-nilai modern, selama tidak menyentuh aspek politik yang dinilai sensitif oleh pemerintah. Salah satu bentuk akomodasi ini adalah pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975, yang menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengintegrasikan aspirasi umat Islam yang formal dan lebih terstruktur (Karmiati, 2023).

Dalam praktiknya, kehidupan keagamaan selama era Orde Baru dikendalikan secara ketat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menstandarisasi ekspresi Islam demi menciptakan stabilitas sosial dan politik. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk membatasi keberagaman praktik keagamaan yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum. Lembaga seperti MUI memainkan peran penting sebagai otoritas keagamaan yang memberikan panduan normatif serta menjembatani hubungan antara negara dan umat Muslim. MUI juga berperan dalam mengeluarkan fatwa yang mengatur pola keberagaman masyarakat dan bertindak sebagai penyaring terhadap ajaran serta aktivitas keagamaan yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi negara.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam penentuan arah dan tata cara pelaksanaan praktik keagamaan, MUI sering kali berfungsi sebagai “penapis” terhadap berbagai ajaran dan kegiatan keagamaan yang mungkin dinilai dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, pengaruh pemerintah Orde Baru terhadap praktik keagamaan bervariasi, beberapa kegiatan keagamaan yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila sering kali dibatasi atau bahkan dilarang, menciptakan suasana ketidakpastian dan keresahan di kalangan umat Muslim di Indonesia.

Salah Satu kebijakan represif pemerintah Indonesia terhadap praktik keagamaan, pada tahun 1980-an pemerintah melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri, karena dianggap sebagai simbol radikalisme dan menentang nasionalisme (Nuraeni, 2021). Kebijakan yang diterapkan pada tahun 1982 ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat Muslim, dengan banyak siswa dan orang tua yang merasa didiskriminasi. Larangan tersebut mendorong terbentuknya organisasi Muslim seperti Wahdah Islamiyah pada tahun 1985, untuk mengadvokasi para pelajar yang menghadapi tekanan akibat larangan jilbab (Jurdi, 2024). Pendekatan pemerintah terhadap Islam bergeser seiring berjalannya waktu, dan akhirnya mengakomodasi praktik-praktik Islam dan mengizinkan penggunaan jilbab di sekolah melalui SK No. 100/C/Kep/D/1991 (Nuraeni, 1991). Namun, kontroversi baru-baru ini muncul terkait aturan wajib berjilbab di beberapa sekolah negeri, yang berujung pada intervensi pemerintah untuk mencegah penegakan atribut keagamaan.



Lebih jauh lagi, pelarangan jilbab dan pembatasan lainnya tidak hanya terbatas pada aspek visual dalam beragama, tetapi juga mencakup jenis-jenis kegiatan keagamaan tertentu. Pemerintah Orde Baru melarang kegiatan keagamaan yang dianggap dapat memicu radikalisasi, termasuk seminar dan diskusi kritis, juga dibatasi untuk menjaga stabilitas nasional (Hidayana, 2023). Pemerintah mengatur pendidikan agama dan khotbah melalui keputusan menteri untuk mengontrol pesan politik. Dalam konteks ini, pemerintah berargumen bahwa tindakan tersebut diambil untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk menghindari potensi konflik yang dapat mengguncang stabilitas nasional. Oleh sebab itu, banyak aktivitas keagamaan yang dianggap menyimpang atau berada di luar kontrol pemerintah sering kali mendapatkan penangguhan atau bahkan penghapusan secara paksa. Pembatasan ini menyebabkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat Muslim, yang merasa hak-hak agama mereka dilanggar.

Islam Pada Era Reformasi

Jatuhnya rezim Orde Baru di Indonesia menyebabkan perubahan signifikan dalam kebebasan beragama dan lanskap politik. Era reformasi ditandai dengan munculnya partai-partai dan organisasi politik Islam baru, yang mencerminkan dinamika keagamaan yang kompleks (Sauki, 2018). Meskipun proses demokratisasi ini memungkinkan ekspresi individu yang lebih besar atas keyakinan mereka, proses ini juga menandai kebangkitan kelompok-kelompok Islam yang lebih tegas dalam mengadvokasi hukum syariah dan menangani isu-isu pluralisme (Suaedy, 2018). Periode pasca-reformasi menjadi saksi berdirinya berbagai partai dan organisasi Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang mana hal ini menggambarkan dinamika yang kompleks dari lanskap keagamaan. Proses demokratisasi ini tidak hanya memberikan kebebasan bagi individu untuk mengekspresikan keyakinan mereka, tetapi juga menandai kemunculan kelompok-kelompok Islam yang lebih berani dalam menyuarakan pendapat terkait syariat Islam dan isu pluralisme.

Organisasi-organisasi Islam memainkan peran strategis selama transisi politik Indonesia. Mereka tidak hanya aktif dalam advokasi penerapan syariat, tetapi juga berkontribusi dalam merespons isu-isu sosial yang relevan. Misalnya, FPI dan MMI berupaya mempromosikan nilai-nilai Islam dalam konteks hukum dan tata negara, membawa pertanyaan tentang bagaimana syariat dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional yang lebih demokratis. Di sisi lain, terdapat juga gerakan moderat yang berfokus pada pluralisme, menunjukkan bahwa terdapat spektrum dalam praktik keagamaan yang diadopsi oleh masyarakat. Banyak organisasi ini berusaha menjembatani dialog antara pemahaman Islam yang militan dan inklusif, menunjukkan bahwa masa reformasi bukan hanya tentang penegakan syariat, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan dalam keragaman budaya dan agama di Indonesia.

Perubahan praktis dalam praktik keagamaan selama era reformasi juga signifikan. Masyarakat Muslim di Indonesia mengalami peningkatan kebebasan untuk menjalankan praktik agama mereka secara terbuka, salah satunya adalah kebebasan dalam mengenakan hijab. Sebelumnya, hijab sering kali terstigma dalam konteks politik dan sosial di era Orde Baru, namun reformasi membawa arus perubahan di mana mengenakan hijab kini menjadi simbol identitas dan kebanggaan. Dalam beberapa kasus, kebebasan ini dipandang sebagai bentuk refleksi dari demokratisasi yang meluas di Indonesia, dan masyarakat menerima dengan baik penampilan para wanita yang mengenakan hijab sebagai bagian dari jati diri mereka (Latief, 2017). Penerimaan



publik terhadap hijab dipengaruhi oleh kampanye pendidikan yang dilakukan oleh berbagai organisasi Islam, yang mempromosikan hak-hak perempuan untuk mengekspresikan identitas mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, pergeseran ini tidak melulu berjalan mulus. Munculnya kelompok radikal juga mencerminkan dampak dari terbukanya ruang demokrasi yang kadang disalahgunakan oleh individu atau organisasi untuk mengeksploitasi isu-isu agama. Beberapa organisasi menggunakan kebebasan baru ini untuk memperjuangkan agenda-agenda yang lebih ekstrem, seperti penegakan syariat secara ketat, yang terkadang berbenturan dengan prinsip-prinsip kebebasan individual yang dijunjung di era reformasi. Interaksi yang terjadi antara berbagai spektrum pemeluk Islam, dari yang moderat hingga ekstremis, menunjukkan dinamika yang sangat multifaset dalam masyarakat Indonesia pasca-reformasi (Latief, 19).

Indonesia pun menghadapi tantangan terhadap pluralisme dan kohesi sosial di tengah masyarakatnya yang beragam, dengan meningkatnya radikalisme yang mengancam identitas nasional. Pandangan radikal dan fundamentalis sering kali menimbulkan intoleransi dan konflik, yang dipicu oleh interpretasi sempit terhadap Islam dan penggunaan agama dalam politik (Fawa'id, 2019). Pendidikan multikultural dipandang sebagai solusi untuk memperkuat persatuan dan mengurangi konflik antar-kelompok (Ibrahim, 2008). Pendidikan multikultural bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan sosial sambil melawan kekerasan dan diskriminasi. Implementasi pendidikan multikultural dalam kurikulum, bersamaan dengan dialog antar agama, sangat penting untuk meminimalisir konflik dalam masyarakat yang majemuk.

Perkembangan pemikiran Islam pada masa Reformasi juga sangat dipengaruhi oleh wacana tentang penerapan syariat Islam. Diskursus mengenai penerapan syariat Islam muncul kembali dan menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi politik dan sosial. Sejumlah organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) tampil sebagai aktor utama dalam mengadvokasi penerapan syariat Islam secara komprehensif (Dandi et al, 2023). Diskusi ini menimbulkan beragam respons; sementara kelompok konservatif mendorong penerapan syariat secara ketat, banyak kalangan yang mengusung moderasi dan inklusivitas dalam pemahaman Islam. Pemikiran moderat ini, seperti yang diutarakan Nurmadina, menggarisbawahi perlunya pendekatan yang seimbang dalam rangka mencapai keadilan sekaligus menghindari ekstremisme yang bisa merusak tatanan sosial. Penerimaan terhadap pluralisme dalam konteks syariat menjadi penting untuk menciptakan keterikatan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk (Qodim, 2002).

Analisis Komparatif

Dinamika Islam di Indonesia dapat dilihat melalui tiga periode utama: Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi, masing-masing dengan konteks sosial, politik, dan praktik keagamaan yang berbeda. Pada Orde Lama (1945-1966), Indonesia yang baru merdeka menghadapi ketegangan ideologis antara nasionalisme, sosialisme, dan agama. Umat Islam berperan aktif dalam perdebatan mengenai dasar negara, berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pemerintahan, meskipun ada ketegangan dengan pemerintah sekuler. Marginalisasi politik terjadi, tetapi masih ada ruang bagi kelompok Islam untuk bersuara melalui partai-partai politik mereka.

Di masa Orde Baru (1966-1998), di bawah kepemimpinan Soeharto, stabilitas politik menjadi fokus utama, dengan pemerintah yang berupaya mengontrol berbagai aspek kehidupan,



termasuk kehidupan keagamaan. Marginalisasi umat Islam semakin meningkat, dengan pembatasan ketat terhadap aktivitas politik, di mana banyak tokoh keyakinan ditangkap atau dibungkam. Meskipun organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tetap memilih jalur moderat dan berusaha untuk berpartisipasi dalam kerangka negara, suara mereka sering diabaikan.

Era Reformasi (1998-sekarang) membawa perubahan signifikan, di mana runtuhnya Orde Baru membuka peluang bagi umat Islam untuk mengekspresikan keyakinan dan berpartisipasi aktif dalam politik. Kesempatan untuk menerapkan syariat Islam secara lebih terbuka meningkat, dan berbagai organisasi serta partai Islam kembali muncul dengan lebih banyak perwakilan dalam struktur politik. Isu penerapan syariat Islam mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar, mencerminkan paradigma yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, terdapat pergeseran signifikan dalam paradigma pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam dari penekanan pada nasionalisme sekuler pada Orde Lama, marginalisasi pada Orde Baru, menuju keterlibatan aktif dan pengakuan di Era Reformasi. Setiap periode mencerminkan tantangan dan karakteristik sosial-politik yang berbeda, menunjukkan perkembangan yang menarik dalam sejarah Islam di Indonesia dan bagaimana umat Islam berinteraksi dengan negara dalam konteks kebijakan publik.

KESIMPULAN

Dinamika pemikiran dan praktik keagamaan Islam di Indonesia dari masa Orde Lama hingga era Reformasi, menyoroti pergeseran signifikan dalam konteks sosial dan politik. Pada masa Orde Lama, marginalisasi politik terhadap Islam terlihat melalui pembubaran partai-partai Islam dan adaptasi NU terhadap Demokrasi Terpimpin, yang memicu munculnya gerakan Darul Islam sebagai respons terhadap penindasan. Selanjutnya, di era Orde Baru, pemerintahan Soeharto menerapkan depolitisasi terhadap organisasi Islam, membatasi ruang gerak politik mereka, meskipun ada upaya untuk mengakomodasi pemikiran keagamaan melalui Majelis Ulama Indonesia. Namun, setelah transisi ke era Reformasi, terjadi pembebasan yang signifikan dalam praktik keagamaan, dengan munculnya partai-partai politik berbasis Islam dan kebebasan beragama yang lebih luas, termasuk simbol identitas seperti jilbab. Meskipun demikian, tantangan baru muncul dari kelompok radikal yang memanfaatkan kebebasan ini untuk agenda ekstrem. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan multikultural dan moderasi beragama dalam menghadapi radikalisme dan menjaga kohesi sosial di tengah pluralisme Indonesia. Perubahan paradigma dalam pemikiran dan praktik keagamaan Islam di Indonesia tidak hanya mencerminkan dinamika internal umat Islam, tetapi juga interaksi kompleks dengan konteks politik dan sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dandi, Muhammad, Hitana Mushthafa A, M R Muzakki, and Rendy Juan A. "Analisis Pemikiran Politik Fundamentalisme Islam Dalam Studi Kasus Gerakan Kelompok Fundamental Islam Di Indonesia Pasca Era Reformasi." *Polikrasi : Journal of Politics and Democracy* 2, no. 2 (2023): 69–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61183/polikrasi.v2i2.30>.
- Darwis, Muhammad, Zuhdiah, and Bahaking Rama. "Pemikiran Pendidikan Islam K.H Ahmad Dahlan Dan K.H Hasyim Asy'ari." *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 60–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol3.Iss1.1005>.



- Fawa'id, Muhammad Rizkon. "Masyarakat Madani Dan Tantangan Radikalisme." *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 130–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1312>.
- Hajar, Imam Ibnu, M. Yunus Abu Bakar, and Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid. "POLITICAL ISLAM IN THE OLD AND NEW ORDERS : ACTIONS AND REACTIONS OF ISLAMIC FIGURES VERSUS THE STATE (1945-1973)." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 10, no. 1 (2024): 46–61. https://doi.org/https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v10i1.8103.
- Hidayana, Rika. "GELIAT MAJLIS TAKLIM DI INDONESIA." *Islamijah : Journal of Islamic Social Sciences* 4, no. 2 (2023): 103–24. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v3i3.17079>.
- Ibrahim, Ruslan. "Pendidikan Multikultural : 8SD \ D 0HPLQLPDOLVLU . RQÁLN GDODP Era Pluralitas Agama." *EL-Tarbawj* 1, no. 1 (2008): 115–27. <https://journal.uui.ac.id/Tarbawi/article/download/192/181>.
- Indrayani, Nelly, and Budi Purnomo. "Transformasi Politik Ke Jalur Dakwah : Studi Analitis Politik Masyumi Tahun 1960-1967." *Diakronika* 23, no. 01 (2023): 2620–9446. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/diakronika/vol23-iss1/311>.
- Jauhary, Hilaluddin, Geta Eldisa Pratiwi, Ariq Zamzami Salim, and Fitroh Fitroh. "Penerapan ISO27001 Dalam Menjaga Dan Meminimalisir Risiko Keamanan Informasi : Literatur Review." *Media Jurnal Informatika*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/mji.v14i1.1581>.
- Jurdi, Syarifuddin, Aksa, and Ashila Salsabila Syarif. "Pembentukan Gerakan Muslimah Wahdah Islamiyah 1985-1991 : Perspektif Sosiologi Politik." *Jurnal Sosiologi USK : Media Pemikiran & Aplikasi* 18, no. 1 (2024): 12–29. <https://doi.org/10.24815.jsu.v18i1.40251>.
- Karmiati, Luci. "ANALISIS ISLAM PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1966-1998." *Tanjak : Surnal Sejarah Dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2023): 77–85. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tanjak/article/download/18183/5815/53283>.
- Laila, Itsna Noor. "Tipologi Pemikiran Pendidikan Islam Di Indonesia." *EDUSIANA : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2022): 132–54. <https://journal.stainim.ac.id/index.php/edusiana/article/view/229/jrl9>.
- Laisa, Emna. "Islam Dan Radikalisme." *ISLAMUNA : Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.
- Latief, Mohamad. "Islam Dan Sekularisasi Politik Di Indonesia." *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 1 (2017): 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974>.
- Loppies, Megiridha. "Pendidikan Zaman Orde Baru : Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto." *Phinisi Integration Review* 6, no. 2 (2023): 237–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/pir.v6i2.47116>.
- Miftahudin, Abdul Fatah, and Ading Kusdiana. "Peran Alex Evert Kawilarang Dalam Menumpas DI / TII Di Jawa Barat." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 2 (2020): 287–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hm.v4i2.9509>.
- Nirmala, Atika, Priti Ike Jelita, and Asmuri. "PENDIDIKAN ISLAM DI ERA ORDE LAMA : KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 18087–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.39565>.
- Nuraeni, Leni, and Setia Gumilar. "PELARANGAN DAN PERJUANGAN : PEMAKAIAN



- JILBAB BAGI KALANGAN PELAJAR PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1982-1991.” *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam* 18, no. 2 (2021): 163–75. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v18i2>.
- Nurhadi, Rofiq. “Pendidikan Nasionalisme-Agamis Dalam Pandangan K.H. Ahmad Dahlan Dan K.H. Hasyim Asyfari.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 121–32. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/1716>.
- Qodim, Husnul, and Rizal Darwis. “PLURALISME DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR PERSPEKTIF MAQĀSID AL-UMMAH.” *FARABI* 19, no. 2 (2022): 132–53. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i2.3029>.
- Rahman, Abd. Rasyid. “PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA MASA KEMERDEKAAN (SUATU KAJIAN HISTORIS).” *Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences* 12, no. 2 (2017): 117–25. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb/article/download/3054/1606>.
- Ridlo, Miftakhur. “NEGARA ISLAM INDONESIA DAN KARTOSUWIRYO (KONSEP GERAKAN POLITIK, MILITER DAN AGAMA).” *Humanistika: Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (2019): 13–34. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/humanistika/article/download/45/18/>.
- Romli, Lili. “Partai Islam Dan Pemilih Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 1 (2004). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=504980&val=10355&title=Partai+Islam+dan+Pemilih+Islam+di+Indonesia>.
- Sauki, M. “Perkembangan Islam Di Indonesia Era Reformasi Pendahuluan.” *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM* 10, no. 2 (2018): 443–58. <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/download/82/77>.
- Sodikin, and Abdul Azis Muhammad. “God ’ s Sovereignty in the 1945 Constitution and Its Implementation in the Formation of Sharia Legislation.” *International Jorunal of Religion* 5, no. 9 (2024): 10–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.61707/pd9kp821>.
- Suaedy, Ahmad. “Gerakan Muslim Progresif Pasca Rejim Suharto Di Indonesia.” *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 2 (2018): 117–36. <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/download/82/77>.
- Suryana, Riyadi. “Politik Hijrah Kartosuwiryo ; Menuju Negara Islam Indonesia.” *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 83–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.33086/JIC.V1I2.1212>.
- Susilawati, Samsul. “MUSLIM MODERAT MERESPON ARUS MODERNITAS DALAM BINGKAI MULTIKULTURAL.” *Edumaspul - Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 245–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.362>.